

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sejak diberlakukannya otonomi daerah pada tahun 1999, berimplikasi pada terjadinya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah kini memiliki kewenangan yang besar untuk merencanakan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan serta program pembangunan yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan daerah setempat. Oleh karena itu, salah satu kunci yang harus diperhatikan dalam desentralisasi adalah pemerintah daerah yang harus lebih responsif terhadap kebutuhan penduduk, sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang pada akhirnya dapat mengurangi kemiskinan di daerah (Fadrul&Pariani, 2018).

Pelaksanaan otonomi di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang efektif. Menurut Undang-Undang No.32 tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan (Santosa dan Rofiq, 2013).

Otonomi Daerah bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan daerah, meminimalisasi kesenjangan antar daerah dan meningkatkan infrastruktur daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang menitikberatkan pada daerah kabupaten dan kota ditandai dengan adanya

penyerahan sejumlah kewenangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan, baik yang menyangkut pengelolaan keuangan daerah, perencanaan ekonomi dan perencanaan yang lain semuanya dilimpahkan dari pusat ke daerah (Gregorius, 2009).

Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang besar kepada daerah untuk menggali potensi yang dimiliki sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dalam rangka memenuhi pelayanan publik. Berdasarkan Undang – Undang No. 32 tahun 2004, salah satu sumber pendapatan daerah yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain PAD yang sah. Setiap daerah mempunyai kemampuan keuangan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan, hal ini menimbulkan ketimpangan fiskal antara satu daerah dengan daerah yang lain. Oleh karena itu, untuk mengatasi ketimpangan fiskal maka pemerintah mengalokasikan dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk mendanai kebutuhan daerah dalam melaksanakan desentralisasi (Permana dan Rahardjo, 2013).

Amrozi (2013) menyatakan bahwa anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam APBD dapat dilihat dari kondisi keuangan suatu Pemerintah Daerah. Pada sisi pendapatan, dengan membandingkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan dapat dilihat dari tingkat kemandirian suatu daerah, dimana semakin tinggi nilainya semakin tinggi tingkat kemandirian keuangan daerah. Dengan tingginya tingkat kemandirian suatu daerah maka

pemerintah daerah dapat leluasa melaksanakan pembangunan daerah dengan menggunakan belanja modal.

Belanja modal tersebut didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya meletakkan kebutuhan secara proporsional posisi belanjanya. Selama ini, belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Menurut Saragih ( 2013 ), menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal – hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan. Peran pemerintah di dalam pembangunan sebagai katalisator dan fasilitator, oleh karena itu pemerintah mengetahui sarana tujuan pembangunan yang akan dicapai. Sebagai pihak katalisator dan fasilitator maka daerah memerlukan sarana dan fasilitas pendukung yang direalisasikan melalui belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik (Dewi&Suyanto, 2015).

Banyak faktor yang kemungkinan dapat mempengaruhi *belanja modal* yaitu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dapat mengukur prestasi dari perkembangan suatu perekonomian pengukuran akan kemajuan sebuah perekonomian memerlukan alat ukur yang tepat, berupa alat pengukur pertumbuhan ekonomi antara lain seperti Produk Domestik Bruto (PDB) atau ditingkat regional disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDRB) yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian dalam jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam harga satuan pasar (Supartoyo dan Tatu, 2013).

Selanjutnya faktor yang mempengaruhi *belanja modal* adalah Dana Alokasi Umum (DAU) . Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari anggaran APBN yang dialokasikan untuk tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam kegiatan desentralisasi. Sejak ditetapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah pusat sangat menginginkan daerah dapat mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga tidak hanya mengharapkan Dana Alokasi Umum (DAU). Pada beberapa daerah peran Dana Alokasi Umum (DAU) sangat signifikan karena belanja daerah lebih diutamakan oleh Dana Alokasi Umum (DAU) daripada Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Siburian dan Juliansyah, 2019).

Berikutnya faktor yang mempengaruhi *belanja modal* adalah Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan dana yang direalisasikan dari APBN bagi daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus suatu daerah (Siburian dan Juliansyah, 2019). Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) ditujukan pada investasi pembangunan, pengadaan peningkatan perbaikan sarana dan prasarana fisik dengan jangka waktu yang panjang termasuk pengadaan sarana fisik yang panjang, dengan adanya Dana Alokasi Khusus (DAK) diharapkan dapat memberi pengaruh pada belanja modal karena aset Dana Alokasi Khusus (DAK) cenderung menambah aset tetap yang dimiliki pemerintah guna meningkatkan pelayanan publik (Ardhani, 2011).

Kemudian faktor lain yang mempengaruhi *belanja modal* adalah Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang disalurkan kepada daerah berdasarkan angka presentase

untuk mendanai kebutuhan dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil (DBH) yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari dua jenis yaitu Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil bukan Pajak (Siburian dan Juliansyah, 2019).

Setelah itu faktor lain yang mempengaruhi *belanja modal* adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Sianipar (2011) dalam (Novianto & Hanafiah, n.d.) menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) memberi dampak positif dan signifikan bagi belanja modal. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa besarnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu penentu dalam menentukan alokasi belanja modal. Semakin besar Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diterima sehingga akan meningkatkan alokasi belanja modal daerah itu sendiri.

Selain itu faktor lain yang mempengaruhi belanja modal adalah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA). Menurut PP RI No. 71 tahun 2010, SiLPA merupakan selisih lebih antara surplus atau defisit anggaran dengan pembiayaan netto. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun sebelumnya yang menjadi penerimaan pada tahun berjalan (SiLPA) merupakan sumber penerimaan internal Pemda yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan – kegiatan tahun berjalan. Menurut (Siburian dan Juliansyah, 2019) Bentuk penggunaan SiLPA ada dua yaitu:

- a. Kegiatan Lanjutan
- b. Kegiatan Baru

SiLPA sebenarnya sebagai indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan terbentuk apabila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen Pengeluaran Pembiayaan, Litbang dalam (Hafizh, 2018).

Penelitian tentang *Belanja Modal* telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yaitu penelitian dari Siburian, Juliansyah (2019) tentang Hubungan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Aceh Tenggara Periode Tahun 2008-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Syukri dan Hinaya,(2019) tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Suryani dan Pariani, (2018) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

Sukarno, dkk (2019) tentang Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Alokasi Anggaran Belanja Modal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil, dan sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal sedangkan pendapatan asli daerah terhadap tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Ayem dan Pratama (2018) tentang Pengaruh Petumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2011-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

Susanti, Fahlevi (2016) tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Belanja Modal (Studi Pada Kabupaten/Kota di Wilayah Aceh). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

Arifah, Haryanto (2019) tentang Analisis Pengaruh Sisa Anggaran, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sisa lebih pembiayaan anggaran tidak berpengaruh terhadap belanja modal, sedangkan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda. Peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai belanja modal, dengan mengembangkan penelitian dari (Siburian dan Juliansyah,2019) serta menambahkan satu variabel independen yaitu pertumbuhan ekonomi, dengan judul **PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA BAGI HASIL, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA MODAL** (*Studi Empiris pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016-2018*).

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dijelaskan di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal?
5. Apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal?
6. Apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijelaskan di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.
2. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.
3. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.
4. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.
5. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.
6. Untuk mengetahui dan mengidentifikasi apakah sisa lebih pembiayaan anggaran berpengaruh terhadap belanja modal.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diketahui manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu alat analisis pemerintah sebagai bahan koreksi dan pertimbangan terhadap kebijakan yang diambil maupun kinerja yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya untuk perbaikan di masa yang akan datang.

## 2. Bagi Akademis

Diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan kepustakaan dan menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

## 3. Bagi penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta menambah referensi mengenai kualitas laporan keuangan, sehingga diharapkan dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

**BAB I PENDAHULUAN.** Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang menjadi topik utama penelitian untuk melakukan penelitian. Dengan adanya latar belakang tersebut, kemudian muncul beberapa rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan untuk memberikan gambaran laporan penelitian.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA.** Pada bab ini berisi telaah literatur yang berhubungan dengan topik penelitian, yang didasari teori dan bukti empiris dari penelitian sebelumnya, sehingga dapat digunakan untuk membangun atau merumuskan hipotesis penelitian serta rerangka pemikiran.

**BAB III METODE PENELITIAN.** Pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang meliputi informasi tentang subjek penelitian, teknik pengumpulan data, definisi operasional dan pengukuran variabel, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN. Pada bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil analisis data.

BAB V PENUTUP. Pada bab ini berisi tentang simpulan berupa poin-poin yang berisi hasil penelitian serta menjawab hipotesis penelitian dan hasil tambahan lainnya, selanjutnya berisi saran untuk subjek atau pihak-pihak yang berkaitan dengan hasil penelitian dan juga untuk penelitian selanjutnya.